

EKSISTENSI MUI BUKITTINGGI DALAM
PEMBINAAN ANAK JALANAN

The Role of MUI Bukittinggi in Guiding Street Children

Salsabilla Rozalm & Tyka

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
akucintac694@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Sep 3, 2024	Oct 15, 2024	Oct 28, 2024	Nov 4, 2024

Abstract

This research is motivated by the role of the MUI towards street children in Bukittinggi City. The purpose of this research is to determine the role of the Bukittinggi MUI in developing street children. The method used in this research is qualitative, with data collection techniques through interviews, observation and documentation studies. The location of this research is in Bukittinggi City. In collecting data for this research, the key informants were the Bukittinggi City MUI, Social Service, Ministry of Religion, UPTD, and street children. The results of the research show that the Bukittinggi City MUI is active in carrying out research on the existence of the MUI in developing street children, namely that the Bukittinggi MUI plays a significant role in providing education and skills that help street children to improve their quality of life. The programs offered, such as religious learning and skills training, have had a visible positive impact in increasing children's self-confidence and motivation to achieve a better future. Children feel accepted and cared for by MUI administrators, who create a supportive environment for them. Even though the children face challenges, such as difficulty focusing and feeling inferior due to their background, they remain optimistic and hope to change their fate. Through the support provided

by MUI, they have the hope of obtaining better jobs and contributing to society. In conclusion, the existence of MUI Bukittinggi in developing street children not only provides education and skills, but also changes the way children view themselves and their future.

Keywords : Bukittinggi City MUI, Role, Street Children, Coaching, Social Programs

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh peranan MUI terhadap anak jalanan di Kota Bukittinggi. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui peran MUI Bukittinggi dalam pembinaan anak jalanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Lokasi Penelitian ini bertempat di Kota Bukittinggi. Dalam pengumpulan data penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah MUI Kota Bukittinggi, Dinas Sosial, Kemenag, UPTD, dan anak jalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Kota Bukittinggi aktif dalam melaksanakan penelitian tentang eksistensi MUI dalam pembinaan anak jalanan adalah MUI Bukittinggi berperan signifikan dalam memberikan pendidikan dan keterampilan yang membantu anak jalanan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Program-program yang ditawarkan, seperti pembelajaran agama dan pelatihan keterampilan, telah memberikan dampak positif yang terlihat dalam peningkatan kepercayaan diri dan motivasi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Anak-anak merasa diterima dan diperhatikan oleh para pengurus MUI, yang menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka. Meskipun anak-anak menghadapi tantangan, seperti kesulitan fokus dan rasa minder akibat latar belakang mereka, mereka tetap optimis dan berharap dapat mengubah nasib. Melalui dukungan yang diberikan oleh MUI, mereka memiliki harapan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berkontribusi kepada masyarakat. Kesimpulannya, eksistensi MUI Bukittinggi dalam pembinaan anak jalanan tidak hanya memberikan pendidikan dan keterampilan, tetapi juga mengubah cara pandang anak-anak terhadap diri mereka sendiri dan masa depan mereka.

Kata kunci: MUI Kota Bukittinggi, Peran, Anak Jalanan, Pembinaan, Program Sosial

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang bertujuan mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosialnya (Trusto Subekti, 2011).

Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Kepedulian terhadap persoalan anak mulai tercatat semenjak tahun 1920-an, se usai Perang Dunia I dimana dalam perang tersebut pihak yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak dimana pada masa itu perempuan dan anak-anak harus berlari, bersembunyi terancam dan tertekan baik secara fisik maupun psikis ketika perang. Akibat dari perang tersebut muncullah keprihatinan terhadap nasib anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia memperhatikan anak secara serius (Dian Permata Sari dan Titik Sumarti, 2017).

Pada pasal 37 dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau kelompok orang dilarang:

- a. Mengumpulkan uang, barang, atau meminta sumbangan di pasar, Fasilitas umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, Sekolah, dan kantor tanpa izin wali kota atau pejabat yang berwenang.
- b. Mengamen, mengemis, menggelandang, berdagang asongan, dan membersihkan kendaraan pada fasilitas umum.
- c. Berpenampilan dan beraktifitas yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengoordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, anak punk dan pembersih kendaraan.
- e. Memberikan sejumlah uang dan barang kepada pengamen, pengemis, gelandangan, anak punk, atau pembersih kendaraan di jalanan dan fasilitas umum.
- f. Sengaja menelantarkan atau membiarkan orang tua atau orang sakit yang berada di bawah tanggung jawabnya (Dian Tannia Rachman, 2023).

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang tidak luput dari permasalahan sosial seperti uraian di atas. Terkait hal ini, pemerintah Bukittinggi memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial tersebut yaitu Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 dengan isi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Mengingat keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga pemerintah Kota Bukittinggi menganggap perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Proses Penyelesaian Pelanggaran Perda Desember 2023

No	Penyelenggara (Perda No. 3 Tahun 2015)	Bulan Lalu	Bulan Ini	Rincian Penyelesaian Bulan Ini				Total Sampai Bulan ini	Keterang an
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Sanksi Admini strasi	Jumlah Sanksi Non Yustisi (Pernya taan)	Reh abili tas	Refresi f Yustisi	Jumlah Kasus	
1.	Pasal 10 (a s/d g)	117	11	2	9	-	-	128	Parkir liar, racing, balap, dll
2.	Pasal 11	1	13	-	13	-	-	14	Tertib jalur hijau
3.	Pasal 15	276	15	4	11	-	-	291	PKL
4.	Pasal 17 (a, c)	99	-	-	0	-	-	99	Menggela ndang, mengame n, pengemis, dll
5.	Pasal 19	22	6	3	3	-	-	28	Tidak membawa KTP
6.	Pasal 20 (1, 2, 3, 4)	126	13	6	4	3	-	139	Mendekati zina
7.	Pasal 21	15	-	-	-	-	-	15	Berlaku sebagai waria
8.	Pasal 23 (1)	2	-	-	-	-	-	2	Minuman keras
Jumlah		658	58	15	40	3	0	716	

Pada Tabel 1. Proses penyelesaian penyelenggaraan perda Desember 2023 di dapat bahwa penyelenggaraan (perda No. 3 Tahun 2015) jumlah kasus yang di dapat pada bulan lalu sebanyak 658 sedangkan pada bulan ini di dapat jumlah kasus sebanyak 58. Selanjutnya jumlah sanksi administrasi sebanyak 15, jumlah sanksi refresif jumlahnya yaitu 40, selanjutnya rehabilitas sebanyak 3, dan pada refresif yustisi jumlahnya 0. Total jumlah kasus yang terjadi seluruhnya adalah sebanyak 716.

Salah satu topik yang sering diperbincangkan dan penting untuk dilindungi adalah mengenai hak-hak anak, terutama anak jalanan. Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa anak jalanan merupakan anak yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan serangkaian kegiatan guna memperoleh uang demi mempertahankan kehidupannya sehari-hari. Anak

jalanan juga mempunyai hak-hak seperti anak yang lain yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara serta memerlukan perhatian khusus oleh semua elemen masyarakat.

Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru harus berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan melakukan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.

Eksistensi MUI Bukittinggi penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan religius di daerah tersebut, serta memastikan bahwa ajaran Islam dapat diterapkan secara konsisten dan relevan dengan kondisi lokal. Secara keseluruhan, MUI Bukittinggi memiliki peran yang multifungsi dalam mendukung kehidupan beragama dan sosial di wilayah tersebut. Eksistensinya memastikan bahwa ajaran Islam dapat diterapkan dengan baik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Bukittinggi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah lembaga keagamaan di Indonesia yang berfungsi untuk memberikan fatwa dan nasihat mengenai berbagai aspek hukum Islam dan masalah sosial. Dalam konteks teori otoritas Max Weber, MUI dapat digolongkan ke dalam kategori Otoritas Tradisional, Otoritas Karismatik, dan Otoritas Legal-rasional (Secara Terbatas). MUI, dalam konteks otoritas Max Weber, lebih banyak digolongkan dalam otoritas tradisional, karena banyak dari fungsinya dan penerimaan masyarakat terhadapnya didasarkan pada tradisi dan norma-norma agama Islam yang sudah ada sejak lama. Namun, elemen otoritas karismatik juga dapat muncul dalam individu-individu tertentu dalam MUI yang memiliki pengaruh besar. Otoritas legal-rasional diterapkan dalam batasan tertentu, terutama dalam konteks peraturan organisasi, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan sistem hukum negara.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Kemudian dari faktor-faktor yang ada akan dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi

penelitian tentang Eksistensi MUI Bukittinggi Dalam Pembinaan Anak Jalanan. Kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada permasalahannya.

Penelitian ini bertempat di Kota Bukittinggi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan Eksistensi MUI Bukittinggi Dalam Pembinaan Anak Jalanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Umum

a. Sejarah Singkat MUI Kota Bukittinggi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada 26 Juli 1975 di Jakarta sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam untuk memiliki wadah yang dapat memberikan fatwa dan nasihat keagamaan. Sebelum keberadaan MUI, tidak ada lembaga formal yang mewakili suara ulama di Indonesia, sehingga pendiriannya diharapkan dapat menjembatani perbedaan pemahaman dalam Islam dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. MUI berfungsi sebagai lembaga fatwa, tempat musyawarah para ulama, dan memberikan bimbingan dalam berbagai aspek kehidupan umat, termasuk isu sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik (Abdullah, A. 2020).

Struktur organisasinya terdiri dari Dewan Pimpinan dan berbagai komisi yang menangani isu spesifik. Selain itu, MUI juga aktif menyikapi isu-isu kontemporer, seperti penggunaan teknologi dan media sosial, dengan memberikan fatwa yang relevan. Di Bukittinggi, MUI berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman agama di masyarakat melalui berbagai program, sehingga memainkan peran penting dalam menjaga kesatuan umat dan menjawab tantangan yang dihadapi dalam era modern (Ali, Hasan. 2023)..

Dengan demikian, MUI menjadi salah satu pilar penting dalam pembinaan umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi memiliki peran penting dalam mengembangkan kehidupan beragama di wilayah tersebut. MUI didirikan untuk menjadi wadah bagi para ulama dan cendekiawan Islam dalam memberikan fatwa, bimbingan, serta melakukan pembinaan umat (Departemen Sosial Republik Indonesia. 2023).

MUI Kota Bukittinggi berdiri pada tahun 1975. Sejak awal berdirinya, MUI Bukittinggi berfokus pada peningkatan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, serta mengedukasi masyarakat tentang ajaran agama. MUI juga terlibat dalam berbagai kegiatan

sosial, dakwah, dan pendidikan, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam menangani isu-isu keagamaan dan social (Fadillah, R., 2022).

MUI Bukittinggi terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam menyikapi isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan agama, politik, dan sosial. Melalui berbagai program dan kegiatan, MUI berupaya menjaga keharmonisan antarumat beragama dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah (Pemerintah Kota Bukittinggi. 2023).

b. Visi dan Misi MUI Kota Bukittinggi

Adapun Visi dan Misi MUI Kota Bukittinggi sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi lembaga yang memiliki wibawa dan mampu menjawab atau merespon permasalahan umat.

2) Misi

- a) Menjaga kredibilitas dan keibawaan MUI di mata umat.
- b) Memberdayakan dan menjalin kekuatan bersama organisasi keagamaan, pengurus mesjid, tokoh-tokoh agama dan masyarakat.
- c) Memberikan fatwa kepada masyarakat dalam bidang keagamaan.
- d) Membina dan meningkatkan wawasan umat dalam bidang keagamaan.
- e) Mengawal Aqidah, Syari'ah dan Akhlak umat agar tidak terjerumus kepada penyimpangan dan kesesatan (Penelitian, 2024).

2. Temuan Khusus

a. Peran MUI Bukittinggi Dalam Pembinaan Anak Jalanan

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang terkait dengan program pembinaan yang dijalankan oleh MUI Bukittinggi. Dari hasil wawancara dengan para pengurus MUI, anak jalanan, dan masyarakat sekitar, ditemukan beberapa diantaranya sebagai berikut.

1) Program Pembinaan

MUI Bukittinggi telah mengimplementasikan berbagai program, seperti pendidikan agama, pelatihan keterampilan, dan kegiatan sosial. Program ini dirancang untuk memberikan anak jalanan keterampilan yang bermanfaat serta pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan.

2) Dampak Positif

Anak-anak yang terlibat dalam program pembinaan menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Mereka lebih disiplin, menunjukkan minat untuk belajar, dan mulai menjauh dari perilaku negatif yang biasanya terjadi di jalanan. Beberapa anak bahkan berhasil melanjutkan pendidikan formal setelah mengikuti program.

3) Peran Ulama

Ulama yang terlibat dalam program pembinaan berfungsi sebagai mentor dan figur panutan. Mereka tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada anak-anak. Otoritas karismatik para ulama sangat berpengaruh dalam menarik perhatian anak jalanan untuk berpartisipasi.

4) Tantangan yang Dihadapi

Meskipun banyak hasil positif, MUI juga menghadapi tantangan, seperti stigma negatif terhadap anak jalanan dan keterbatasan sumber daya untuk menjalankan program secara berkelanjutan. Beberapa anak juga mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru setelah mengikuti program (Weber, M., 2006).

Pembinaan anak jalanan oleh MUI Bukittinggi mencerminkan integrasi antara nilai-nilai agama dan respons sosial terhadap masalah yang dihadapi oleh anak-anak tersebut. Dengan menggunakan teori Max Weber tentang otoritas, kita dapat memahami bagaimana MUI memanfaatkan otoritas legal-rasional, tradisional, dan karismatik dalam program-programnya (Rachman, Dian Tannia. 2023).

Otoritas Legal-Rasional terlihat dalam struktur dan legitimasi program-program yang dirancang oleh MUI. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan kerjasama dengan lembaga lain, MUI mampu menjalankan program dengan lebih terencana dan terarah. Hal ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa program yang dijalankan adalah sah dan bermanfaat.

Otoritas Tradisional berfungsi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap MUI. Sebagai lembaga yang dihormati, MUI memanfaatkan tradisi keagamaan yang kuat di Bukittinggi untuk mengedukasi anak jalanan tentang nilai-nilai moral dan etika. Penghormatan terhadap ulama sebagai pemimpin spiritual menjadi faktor penting dalam menarik anak-anak untuk ikut serta.

Otoritas Karismatik sangat penting dalam menciptakan hubungan yang erat antara ulama dan anak jalanan. Para ulama yang berkarisma mampu menginspirasi dan memotivasi anak-

anak, membuat mereka merasa dihargai dan didukung. Pendekatan yang penuh empati ini membantu anak-anak untuk lebih terbuka dan berani berpartisipasi dalam program pembinaan.

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bukittinggi dalam pembinaan anak jalanan sangat signifikan dan melibatkan berbagai aspek. MUI berfokus pada pendidikan agama dengan memberikan pengetahuan tentang Islam yang tidak hanya mencakup ajaran dasar, tetapi juga penanaman nilai-nilai moral dan etika untuk membentuk karakter positif. Selain itu, MUI mengadakan pelatihan keterampilan, seperti menjahit dan memasak, untuk membantu anak-anak memperoleh kemampuan yang dapat dipasarkan, sehingga mereka memiliki peluang kerja yang lebih baik di masa depan. Pendekatan sosial dan emosional juga menjadi bagian penting dari pembinaan ini, di mana MUI menciptakan kegiatan kelompok yang memperkuat rasa kebersamaan dan dukungan emosional, dengan kehadiran ulama sebagai mentor yang memberikan inspirasi. Kolaborasi dengan Dinas Sosial dan lembaga lain memperkuat program-program yang ada, memastikan anak-anak mendapatkan dukungan komprehensif (Prabowo, Rudi, 2023). MUI juga terlibat dalam kampanye kesadaran sosial untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kondisi anak jalanan. Upaya rehabilitasi dan integrasi sosial menjadi fokus, dengan harapan anak-anak yang dibina dapat kembali ke jalur yang benar dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, peran MUI Bukittinggi dalam pembinaan anak jalanan menunjukkan bagaimana integrasi nilai-nilai agama, dukungan sosial, dan pendekatan yang bersifat personal dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan anak-anak tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan dukungan sumber daya dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan program pembinaan bagi anak jalanan di masa depan.

b. Analisis Teori Tindakan Max Weber

Analisis Teori Tindakan Max Weber memberikan kerangka untuk memahami perilaku individu dalam konteks sosial yang lebih luas, dengan membedakan tindakan sosial menjadi empat kategori utama (Weber, M., 2006). Pertama, tindakan rasional (instrumental) dilakukan berdasarkan pertimbangan efisiensi untuk mencapai tujuan yang jelas, seperti seorang anak jalanan yang belajar keterampilan menjahit untuk meningkatkan peluang kerja. Kedua, tindakan rasional (nilai) berlandaskan pada keyakinan moral dan nilai-nilai, misalnya seorang anggota MUI yang berkomitmen membantu anak jalanan karena panggilan agama

dan kemanusiaan. Ketiga, tindakan afektif berasal dari emosi dan perasaan, seperti relawan yang tergerak untuk membantu anak jalanan setelah melihat kondisi mereka. Terakhir, tindakan tradisional muncul dari kebiasaan dan norma yang diwariskan, seperti praktik-praktik masyarakat yang mendukung anak jalanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tentang eksistensi MUI dalam pembinaan anak jalanan adalah MUI Bukittinggi berperan signifikan dalam memberikan pendidikan dan keterampilan yang membantu anak jalanan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Program-program yang ditawarkan, seperti pembelajaran agama dan pelatihan keterampilan, telah memberikan dampak positif yang terlihat dalam peningkatan kepercayaan diri dan motivasi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Anak-anak merasa diterima dan diperhatikan oleh para pengurus MUI, yang menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mereka.

Meskipun anak-anak menghadapi tantangan, seperti kesulitan fokus dan rasa minder akibat latar belakang mereka, mereka tetap optimis dan berharap dapat mengubah nasib. Melalui dukungan yang diberikan oleh MUI, mereka memiliki harapan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berkontribusi kepada masyarakat. Kesimpulannya, eksistensi MUI Bukittinggi dalam pembinaan anak jalanan tidak hanya memberikan pendidikan dan keterampilan, tetapi juga mengubah cara pandang anak-anak terhadap diri mereka sendiri dan masa depan mereka.

Berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan dan disajikan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa MUI berperan penting dalam memberikan

dukungan spiritual, sosial, dan pendidikan kepada anak-anak yang hidup di jalanan. Melalui berbagai program dan kegiatan, MUI berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kondisi anak jalanan dan pentingnya pelatihan yang berkelanjutan.

MUI juga telah menjalin kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak tersebut. Namun, tantangan seperti pembatasan sumber daya dan pembatasan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang lebih kuat antara MUI, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memaksimalkan dampak positif dari program-program ini. Secara keseluruhan, eksistensi

MUI Bukittinggi dalam pembinaan anak jalanan merupakan langkah yang konstruktif dan perlu terus didukung agar tujuan pembinaan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2020). Sejarah dan Perkembangan MUI di Indonesia. Jakarta: Penerbit Maju.
- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sosiologi*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>
- Al-Fatih, Imran. (2021). "Implementasi Fatwa MUI Bukittinggi dalam Isu-isu Sosial Kontemporer." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 17, no. 4: 85-100.
- Ali, Hasan. (2023). "Eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bukittinggi dalam Konteks Pembinaan Sosial dan Agama." *Jurnal Studi Agama dan Sosial* 16, no. 3 : 50-65.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2023). Pedoman Pembinaan Anak Jalanan. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Fadillah, R. (2022). Strategi Pembinaan Anak Jalanan di Kota Bukittinggi. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 15(2), 45-59.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(2), 250–358.
- Gunawan, Ary H. (2010). Pengantar Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hak, P., Jalanan, A., Fitrian, D., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan. (Debby Fitrian Dan Anang Dony Irawan). 107–115.
- Hamsyukur. (2017). Pembinaan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Di Kota Makassar. *Jurnal Tomalebbi*, 2, 43–57.
- Hartono, Rudi. "Keterlibatan MUI Bukittinggi dalam Pemberdayaan Anak Jalanan: Analisis Program dan Dampak." *Jurnal Studi Sosial dan Komunitas* 18, no. 4 (2022): 95-110.
- Hasan, A. (2021). Peran LSM dalam Pembinaan Anak Jalanan: Studi Kasus di Payakumbuh. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 30-42.
- Ongki Karisma Mahardi. 2018. Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Dan Anak Pustus Sekolah (Studi Kasus Di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kampung Anak Negeri Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya). Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Pemerintah Kota Bukittinggi. (2023). Laporan Kegiatan MUI Kota Bukittinggi. Bukittinggi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Prabowo, Rudi. (2023). "MUI Bukittinggi dalam Konteks Reformasi Sosial: Analisis dan Tindakan." *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 21, no. 4: 95-110.
- Prasetyo, H. (2020). "Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus di Kota Bukittinggi". *Jurnal Sosiologi*, 15(2), 45-60.
- Rachman, Dian Tannia. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Surabaya. Tesis. Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Surabaya.

- Wahyudi, A., Usman, J., & Mone, A. (2021). Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Journal Sosiologi*, 2(4), 1287–1299. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Weber, M. (2006). *Ekonomi dan Masyarakat: Dasar-dasar Sosiologi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Wina Rusmatika. (2006) . Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 3.3 (2022), 132–41.